

Pancasila Sebagai Alternatif Solusi Ideologi Era Postmodern

Edy Syahputra Sihombing¹ David Michael Setyadarma²

¹ Program Studi Sarjana Filsafat Keilahan, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia; edysyahputrashb@unpar.ac.id

² Program Studi Sarjana Filsafat Keilahan, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia;
6121901004@student.unpar.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Liberalisme

Komunisme

Postmodernisme

Relativisme

Pancasila

Article history:

Received : 2024-05-14

Revised : 2024-12-26

Accepted : 2024-12-31

DOI:

<https://doi.org/10.26593/jsh.v4i02.7962>

ABSTRAK

Era postmodernisme, sebagaimana digambarkan oleh Jean-François Lyotard, ditandai oleh paradigma relativisme yang mendalam, di mana kebenaran dan nilai-nilai dianggap tidak absolut, tetapi bergantung pada perspektif dan konteks. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia terbagi dalam dua kekuatan ideologi besar, yakni Liberalisme dan Komunisme, yang bersaing dalam Perang Dingin untuk mendapatkan dominasi global. Meskipun setelah berakhirnya Perang Dingin, Liberalisme dianggap relevan dengan kondisi dunia pasca-konflik, berbagai polemik menunjukkan bahwa ideologi ini tidak sepenuhnya mampu mengatasi tantangan relativisme yang berkembang dalam era postmodern. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi relevansi ideologi Pancasila sebagai alternatif solusi dalam menghadapi kompleksitas relativisme postmodern. Penulis berargumen bahwa Pancasila, dengan dasar-dasar nilai inklusif dan universal, menawarkan sebuah ideologi yang dapat memberikan stabilitas dan integrasi dalam masyarakat yang semakin plural dan terfragmentasi.

ABSTRACT

The postmodern era, as described by Jean-François Lyotard, is characterized by a deep paradigm of relativism, where truth and values are seen not as absolute but contingent upon perspectives and contexts. After World War II, the world was divided into two major ideological forces, Liberalism and Communism, which competed in the Cold War for global dominance. Although, after the Cold War, Liberalism was deemed relevant to the post-conflict world, various debates indicate that this ideology is not fully capable of addressing the challenges posed by relativism in the postmodern era. In this context, this study employs a qualitative approach with a literature review method to explore the relevance of Pancasila as an alternative solution to the complexities of postmodern relativism. The author argues that Pancasila, with its inclusive and universal values, offers an ideology that can provide stability and integration in a society that is increasingly plural and fragmented.

1. PENDAHULUAN

Setelah perang dunia kedua, situasi dunia mengalami pertengkaran ideologi antara Liberalisme dan Komunisme yang ditandai dengan dimulainya Perang dingin. Keduanya direpresentasikan dengan dua negara yaitu Amerika Serikat dengan Liberalisme dan Union of Soviet Socialist Republics (USSR) atau Uni Soviet dengan ideologi Komunisme. Perang ideologi itu berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet yang berakibat mudurnya pengaruh ideologi Komunis secara internasional. Masa-masa berikutnya merupakan kurun waktu mulai berjayanya Liberalisme yang mengandaikan bahwa ideologi ini adalah ideologi terbaik sehingga memiliki banyak pengaruh di sana-sini.

Pada masa menjelang akhir perang dunia kedua, ada satu ideologi lain lagi yang sebenarnya lahir namun belum memberi pengaruh dan belum turut terlibat dalam perang dingin ideologis. Ideologi itu adalah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPK. Pancasila ini bisa disebut bukan “dirumuskan” oleh para konseptor yang lalu diterapkan kepada bangsa Indonesia melainkan para konseptor ini “menggali” nilai-nilai yang sudah ada dalam jati diri bangsa Indonesia, lalu mereka merumuskannya secara verbal dalam sebuah rumusan yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Dalam konteks perkelahian antara Liberalisme dan Komunisme, hal yang menarik dari Pancasila adalah jika ditafsirkan terlalu ke kiri maka ia akan cenderung memiliki nuansa ideologi sosialis yang dekat dengan komunis akan tetapi jika kita menariknya terlalu ke kanan maka ia akan menjadi liberalis (Kembangpol Semarang, 2022). Hal ini membuat Pancasila memiliki daya tarik untuk ditafsirkan secara baru dan sebagai tawaran diantara ideologi dominan sehingga memiliki pengaruh yang signifikan di kancah internasional.

Pada tahun 1974, seorang filsuf berkebangsaan Prancis bernama Jean François Lyotard menerbitkan buku bertajuk *Postmodern* dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada 1984 (Stanford Edu, 2022). Terbitnya buku itu bisa disebut sebagai tonggak dimulainya era baru yaitu Postmodern. Postmodernisme sendiri merupakan ‘kritik’ atas masa modernisme. Lyotard menggambarkan postmodern sebagai segala kritik atas pengetahuan modernisme (Johan Setiawan, 2018, pp. 9). Era baru ini pun mengubah berbagai jenis paradigma berpikir termasuk di dalamnya adalah muncul cara pandang Relativism atau Relativisme. Karakter signifikan dari cara berpikir relativisme adalah tidak adanya kebenaran absolut dalam menalar dan menakar realitas.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi yang potensial tepat sebagai tawaran pada masa postmodern yang menawarkan cara pandang relativisme terhadap realitas kehidupan. Cara pandang relativisme perlu dijawab agar tidak memberi pengaruh yang luas terhadap pengambilan keputusan dan mempengaruhi cara pandang manusia Indonesia khususnya untuk membangun realitas. Perspektif nilai Pancasila menolak kebebasan radikal tanpa batas dalam relasi dan membangun peradaban, banyak hal terkait dengan moral dan etika perlu dilihat dalam konteks hidup bersama sebagai masyarakat yang pada titik tertentu membutuhkan patokan arah kebenaran, akan tetapi relativisme dapat menolak itu dan menawarkan cara hidup yang bisa jadi lepas dari konteks nilai Pancasila. Misalnya, pandangan permisif terhadap realitas LGBT sebagai sebuah pilihan hidup, realitas hubungan tanpa ikatan, relativisme moral dan sampai pada relativisme terhadap kebenaran untuk dasar kehidupan bersama. Selain tawaran terhadap problematika realitas relativisme, dalam tulisan ini juga mencoba melihat dan menawarkan potensi Pancasila sebagai ideologi yang dapat memberi pengaruh terhadap perkelahian Komunisme dan Liberalisme sebagai ideologi yang dominan memberi pengaruh terhadap cara pandang dan cara berpikir. Jika melihat pada sejarah, Komunisme dan Sosialisme tidak benar-benar relevan dengan kondisi masyarakat dan saat ini pun Liberalisme tidak benar-benar bisa menjawab persoalan masa kini, maka penulis menawarkan Pancasila sebagai alternatif solusi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan konsentrasi pada upaya Studi Literatur/Pustaka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang didukung oleh metode studi literatur. Literatur yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel, berita, dan

sumber lainnya, baik dalam bentuk fisik maupun virtual/digital. Sumber literatur tersebut diperoleh dari literatur cetak maupun media digital, baik daring maupun luring. Namun, penulis memutuskan untuk tidak menggunakan artikel yang berasal dari beberapa situs web tertentu. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu filosofis yang relevan terkait dengan Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan telaah literatur terkait untuk merumuskan hipotesis dan menarik kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah deduktif, yang dimulai dengan empat topik utama: Liberalisme, Komunisme, Pancasila, dan Postmodernisme. Topik-topik ini dianalisis untuk merumuskan hipotesis mengenai ideologi mana yang dapat menjadi alternatif solusi dalam menghadapi era postmodern yang cenderung bersifat relatif.

Melalui pemeriksaan kritis terhadap ideologi-ideologi ini, penulis berusaha memahami implikasi-implikasi yang ditimbulkan di masyarakat kontemporer, khususnya dalam konteks filosofi dan politik Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Pancasila dapat menawarkan dasar ideologi yang stabil di tengah pengaruh liberalisme, komunisme, dan postmodernisme yang semakin kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana ideologi-ideologi yang bersaing ini membentuk wacana publik dan memberikan solusi potensial terhadap tantangan yang dihadapi dalam era yang serba relatif.

3. HASIL DAN DISKUSI

Selayang Pandang Tentang Liberalisme

Sekitar abad 18-19 M, di Prancis dan Inggris berkembang suatu ideologi yang mengedepankan kebebasan individu. Itulah yang disebut dengan Liberalisme (Heru Nugroho, 2000, pp. 2). Ideologi ini muncul dalam bingkai perlawanan terhadap kekuatan absolut yang cenderung mengeksploitasi manusia dan mengekang kebebasan untuk berekspresi dan didasari rasionalitas umum yang dikenal sebagai Kontrak Sosial seperti yang ditawarkan oleh John Locke. Gagasan Kontrak Sosial ini juga didasari pada prinsip-prinsip keadilan universal – berlaku untuk semua manusia – yang dicetuskan oleh John Locke. Ia pun berpendapat bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup, bebas, dan dapat memiliki properti pribadi (Dwi Susanto, 2004, pp. 262). Bagi John Locke, bahkan hak manusia harus sepenuhnya diakui bukan hanya mencakup hal politik melainkan hak untuk menentukan secara personal tujuan hidup dan mendefinisikan siapa dirinya.

Lahirnya Liberalisme memang tidak dapat dilepaskan dari Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika di Inggris (pada saat itu dikuasai oleh Inggris). Pada akhir abad ke-19, Liberalisme itu mengejawantah dalam bentuk politik yaitu demokrasi di mana setiap individu memiliki kebebasan/kemerdekaan, kesamaan hak, dan hak pilih (universal suffrage), (Dwi Susanto, 2004, pp. 263). Liberalisme ini pun akhirnya memberi dampak pada aspek yang umumnya penyelenggaraan negara yaitu bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif Liberalisme ketiga aspek ini harus didasari oleh kebebasan individu. Oleh sebab itu, dalam bidang politik setiap individu memiliki suara untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, umumnya suatu negara akan menggunakan sistem demokrasi dalam perpolitikannya jika berlandaskan sebagai negara liberal. Dalam perspektif Liberalisme, sistem demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara dianggap sebagai suatu sistem yang dapat mengakomodasi secara maksimal tentang kebebasan individu dan hak politik masyarakat.

Dalam bidang sosial, prinsip egaliter adalah kata yang tepat untuk menggambarkan aspek sosial dalam sebuah negara liberal. Setiap orang bebas berpendapat, memiliki kesempatan yang sama, dan berkedudukan sama dan setara sebagai keadaan alami hakikat manusia. Kebebasan individu ini harus berdampak dan dapat dirasakan dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi dalam perspektif Liberalisme hendaknya didasari upaya penciptaan suasana ekonomis yang ditandai dengan kebebasan dan memfasilitasi semua orang untuk mendapatkan keuntungan sekaligus memberi dampak bagi orang lain juga sebagai bentuk dasar penghormatan terhadap kebebasan orang lain.

Dalam paradigma sistem liberal, aspek ekonomi berorientasi pada pasar yang demokratis dan bebas bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri. Di dalam ekonomi dikenal istilah *Laissez-faire*. Istilah ini muncul dari latar belakang situasi di Prancis. Pada rezim Louis XIV di Prancis,

pemerintahannya berikhtiar untuk membantu industri namun Comptroller General of Finance meminta agar pemerintah tidak campur tangan dalam industri. Lahirnya Laissez-faire dilatar belakangi pentingnya membangun paradigma liberal dalam aspek ekonomi dengan meminimalisir peran kekuasaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam definisi yang dicatat dalam situs Britannica, Laissez-faire berarti kebijakan seminimal mungkin dari intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi individu dan masyarakat (Britannica, 2022). Intervensi pemerintah yang berlebih dalam urusan ekonomi dianggap dapat mengganggu roda perekonomian masyarakat yang didasari pada prinsip kebebasan.

Selayang Pandang Tentang Sosialisme dan Komunisme

Tidak berbeda jauh dari Liberalisme, Sosialisme muncul di era yang kurang lebih sama di Inggris dan Prancis. Tujuannya tidak lain adalah untuk melawan ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi akibat praktik Liberalisme. Ketidakadilan diindikasikan dengan adanya fakta perbedaan yang signifikan antara 'si miskin' dan 'si kaya' atau munculnya fakta relasi majikan dan buruh yang cenderung tidak menguntungkan buruh. Sosialisme mengusulkan untuk mengembangkan tindakan altruistik-tindakan berorientasi sosial-dan melembagakan kerjasama antar individu. Kesejahteraan tidak lagi mengarah pada kesejahteraan individu saja namun secara luas dalam masyarakat sosial (Heru Nugroho, 2000, pp. 3). Dalam istilah lain adalah Bonum Commune yang berarti bahwa penciptaan kebaikan bersama yang ditandai adanya keadilan sosial (Heru Nugroho, 2000, pp. 4).

Dua tokoh yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels, memiliki pengaruh signifikan dalam menyumbangkan pemikiran yang melahirkan Sosialisme. Mereka berpendapat, sosialisme lahir karena bentuk perlawanan terhadap Kapitalisme yang potensial melahirkan dikotomi kesenjangan antara si pemilik modal dan pekerja. Kapitalisme sebagai ideologi ekonomis adalah saudara kandung Liberalisme. Kapitalisme mendasarkan praktik ekonomi dengan prinsip kebebasan kreatif dan inovatif bagi individu untuk mengembangkan aspek ekonomi. Bentuk perlawanan awal adalah membangun persatuan kaum buruh dalam partai buruh untuk melawan kaum borjuis atau kaum si pemilik modal (Heru Nugroho, 2000, pp. 4). Kaum borjuis memang paling diuntungkan dengan adanya paham liberal dalam praktik ekonomi kapitalis. Kebebasan yang mereka miliki membuat mereka dapat dengan sebebas-bebasnya berusaha meraih keuntungan dan kebebasan ini pun dilindungi dan karena itu juga sah adanya (Dwi Susanto, 2004, pp. 263). Dalam pemikiran kedua tokoh tadi, tahap akhir dari ideologi sosialisme adalah komunisme. Jika dilihat dari tujuannya, sosialisme lahir guna menghilangkan ketimpangan sehingga tercapai bonum commune atau kebaikan bersama bagi semua. Dengan itu dasar utama realitas kehidupan masyarakat adalah menciptakan keadilan sosial bagi semua tanpa memandang perbedaan antara si kaya dan si miskin, majikan dan buruh. Tahap terakhir dari sosialisme itu adalah prinsip kesatuan komunis di mana negara melebur dalam masyarakat dan ditandai dengan kesetaraan sebagai manusia sehingga tidak boleh ada bentuk bentuk eksploitasi yang lahir dari perbedaan praktik ekonomis.

Konsep komunisme dalam pemikiran Karl Marx adalah suatu kondisi di mana kelas-kelas dalam masyarakat sudah tidak ada. Sebagai kritik terhadap Kapitalisme yang rentan melahirkan dikotomi pemodal dan pekerja, atau tuan dan budak, kapitalis dan proletar. Dalam fakta kapitalis cenderung potensial memperlakuk kaum buruh untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagi Karl Marx relasi kaum kapitalis dan kaum buruh adalah relasi yang rentan konflik demi perjuangan kesetaraan kelas Frans Borgias (ed) 2019, pp.77. Konsep Komunisme sebagai ideologi memang sangat ideal untuk sebuah kehidupan masyarakat namun sebenarnya konsep ini merupakan utopia karena Marx sendiri yang juga tidak dapat mendefinisikan praksis dari masyarakat tanpa kelas. Di kemudian hari, komunisme pun turut terdegradasi eksistensinya dimulai dengan runtuhnya Uni Soviet.

Pergeseran pada Perang Ideologi

Pembahasan selayang pandang Perang Dunia II dan sedikit meneropong konteksnya dapat menjadi pengantar yang tepat sebelum menuju ke pembahasan lebih lanjut dalam bagian ini. Pada tahun 1939, Jerman mengadakan perjanjian dengan Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin

untuk tidak saling invasi selama sepuluh tahun pasca perjanjian. Perjanjian itu ditandatangani pada 23 Agustus 1939 tepat beberapa waktu sebelum Perang Dunia II dimulai. Tentu perjanjian ini tidaklah tanpa maksud karena keduanya memiliki agenda masing-masing. Uni Soviet menjadi memiliki waktu untuk membangun kekuatan militer sementara Jerman – dengan kanselir mereka yaitu Adolf Hitler – dapat menyerang Polandia tanpa gangguan dari Uni Soviet (bahkan ada perjanjian membagi dua Polandia), (History World War, 2022).

Perang Dunia pun dimulai dengan invasi Nazi Jerman ke berbagai area Eropa. Pada awal peperangan, tepatnya pada bulan 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia yang mendapatkan jaminan bantuan militer dari Inggris dan Prancis. Dua hari setelah invasi, kedua negara ini pun mendeklarasikan perang pada Jerman. Perang di Polandia ini semakin parah dengan invasi Uni Soviet pada 17 September 1939 yang akhirnya pada awal 1940, Polandia pun berhasil dikuasai dan dibagi dua oleh Jerman dan Uni Soviet (History World War, 2022).

Keharmonisan Jerman dan Uni Soviet dalam pertempuran Polandia hancur setelah Jerman melakukan invasi ke Uni Soviet dalam operasi yang terkenal “Operasi Barbarossa” pada 1941-1942. Hanya dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, Jerman berhasil melakukan invasi sampai ±300 Km dari Moskwa. Invasi inilah yang membuat Uni Soviet terlibat dalam Perang Dunia II melawan Jerman. Pada akhir tahun 1941, Amerika Serikat baru memutuskan masuk dalam peperangan besar ini akibat diserangnya Pearl Harbor oleh Jepang (7/12). Jepang saat itu bergabung dalam blok Axis bersama Jerman dan Italia sementara Amerika Serikat bergabung dalam blok Sekutu (Allied). Amerika Serikat terlambat beberapa bulan dari Uni Soviet dalam berperang mengalahkan blok Axis.

Tahun 1945, Perang Dunia II benar-benar berakhir dengan rentetan kekalahan blok Axis. Rentetan kekalahan ini dimulai dengan tumbangnya Benito Mussolini di Italia pada tahun 1943 lalu dilanjutkan dengan menyerahnya Jerman pada 8 Mei 1945 setelah Uni Soviet berhasil menyerang balik Jerman dan menguasainya. Rentetan kekalahan ini semakin diperparah dengan dibomnya dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki lalu diakhiri dengan menyerahnya Negeri Matahari Terbit ini pada 2 September 1945. Berakhirnya Perang Dunia II tidak begitu saja melepaskan dunia dari ‘perang’ karena setelahnya muncul perang baru yaitu perang ideologis yang lebih dikenal sebagai perang dingin. Jika sebelumnya dikenal istilah blok Sekutu dan blok Axis, maka pada perang ‘baru’ ini pun dikenal dua blok yaitu blok Barat dan blok Timur. Kedua blok ini mewakili dua ideologi dan ‘penganutnya’ yaitu blok Barat – Amerika Serikat – dengan paradigma liberalismenya dan blok Timur – Uni Soviet – dengan paradigma komunismenya. Amerika Serikat sudah mengkhawatirkan keberadaan komunisme – khususnya kepemimpinan Joseph Stalin. Di sisi Uni Soviet, mereka pun kecewa karena mereka yang melawan blok Axis sebelum Amerika Serikat dan memenangkan perang tersebut namun oleh Amerika Serikat dilarang masuk dalam komunitas internasional (History World War, 2022). Dalam perang inilah Liberalisme dan Komunisme bersaing merebutkan pengaruh ke seluruh dunia.

Perang dingin ini bukan merupakan perang yang terjadi seperti halnya Perang Dunia II karena kental dengan kontak senjata. Kedua kubu, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak saling serang di tanah atau di bagian udara milik masing-masing kubu. Kontak senjata kemudian baru benar-benar terjadi kembali pada tahun 1950 saat Perang Korea dimulai. Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet menyerang tetangga mereka, Korea Selatan yang pro-Barat. Terdesaknya Korea Selatan menjadi kekhawatiran Amerika Serikat bahwa ini menjadi kampanye militer ‘komunisme’ yang akhirnya dibalas dengan terjunnya negara-negara sekutu Amerika Serikat – yang dikenal dengan Pakta Atlantik Utara atau NATO – ke dalam peperangan.

Perang Dingin sempat mengalami penurunan tensi pada saat Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Richard Nixon namun kembali naik saat Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat. Perang Dingin mulai mencapai akhirnya saat Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Berbagai ‘badai’ menerpa negeri itu setelah kebijakan Glasnost – politik keterbukaan – yang diambil oleh Gorbachev dan memulai disintegrasi Uni Soviet. Tahun 1989, tembok Berlin – yang menjadi tanda pembagian wilayah antara Liberalisme dan Komunisme di Jerman – runtuh. Tahun 1991, Perang Dingin benar-benar berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet (History World War, 2022). Berakhirnya perang ini juga menandai berakhirnya pengaruh dominan Komunisme di dunia.

Ada perpindahan perang, yang tadinya di darat, udara dan lautan, kini perang ada dalam ruang imajinasi ideologi yang berusaha memberi dampak dan pengaruh terhadap seluas-luasnya wilayah. Pengaruh ini tentu diikuti dengan dampak dan keuntungan bagi masing-masing promotor ideologi. Perang ini kemudian berada dalam perkelahian prinsip nilai tentang bagaimana dan apa sebenarnya manusia terutama dalam prinsip ideologis sebagai prinsip penyelenggaraan negara. Perkelahian tersebut memberi dampak yang unik dalam setiap sisi. Konsekuensinya, dapat melahirkan gaya dan cara hidup yang pragmatis demi kepentingan individu dan cenderung relatif dan apatis terhadap kebenaran yang dapat mengikat semua. Tawaran relativisme sebagai konsekuensi postmodernisme di tengah perkelahian ideologis muncul sebagai selubung pemikiran yang enggan diutarakan tetapi senang untuk dipraktikkan. Dilihat dari sisi Pancasila tentu ini menjadi masalah yang penting untuk dibahas dengan melihat dan menempatkan Pancasila sebagai nilai yang dapat memberi ruang akomodasi terhadap realitas pertandingan ideologis yang menawarkan paradigma relativisme yang kuat.

Pancasila: Sintesis Ideologi dan Rekonsiliasi Bangsa

Menjelang merdekanya Indonesia, saat itu dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Badan ini bersidang untuk mencari ligatur atau dasar pemersatu Indonesia sebagai sebuah negara. Dasar itu kemudian dicari, diejawantahkan dan dirumuskan pada rentang 29 Mei 1945 s.d. 1 Juni 1945, dan puncaknya pada Soekarno berpidato di depan Sidang BPUPKI. Soekarno menamakan 'Pancasila' untuk usulan ligatur nya. Walaupun kini peristiwa itu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, namun usulan Soekarno tentang Pancasila tidak benar-benar diterima. Soekarno mengusulkan Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau prinsip kemanusiaan; Mufakat atau demokrasi; Kesejahteraan sosial; dan prinsip Ketuhanan yang berkebudayaan.

Usulan Pancasila itu sebenarnya diterima oleh Sidang BPUPK namun dielaborasi oleh Panitia Sembilan. Sejak saat itu, dasar negara pun dirumuskan dalam lima poin yang kemudian tetap disebut Pancasila. Hasil dari rapat Panitia Sembilan adalah Piagam Jakarta. Ada perbedaan dari Pancasila usulan Soekarno dengan yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan. Walakin, jika dibaca ulang maka secara implisit itu tidak jauh dari usulan Soekarno. Tawaran Soekarno adalah Ketuhanan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebudayaan yang mengakar di Indonesia dan tidak selalu terikat pada referensi ketuhanan yang datang dari luar negara Indonesia. Piagam Jakarta menawarkan bahwa gagasan ketuhanan itu hendaknya berbasis pada referensi agama tertentu, itu sebabnya dalam Piagam Jakarta tercantum sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya".

Sebagai *weltanschauung* (*Weltanschauung* adalah istilah dalam bahasa Jerman yang mengartikan pandangan atau pendirian hidup. Pancasila sebagai *Weltanschauung* dikenalkan oleh Ir. Soekarno yang menerjemahkan Pancasila sebagai sumber inspirasi pembentukan identitas atau jati diri manusia Indonesia), (Pusat Studi Pancasila UNPAR, 2012, pp. 30). Pancasila merupakan hasil dari refleksi 'merumuskan' dan mengkaji siapakah sejatinya manusia Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno. Walakin, Pancasila ini dipandang sebagai potensi yang jika diejawantahkan sebagai pandangan hidup maka menjadi *actus*. Dalam perjalanannya, masyarakat Indonesia mengiluminasi Soekarno melalui realita manusia Indonesia dan dari akar budaya manusia Indonesia itu juga kemudian lahir Pancasila.

Pancasila kemudian memanifestasikan dirinya menjadi *weltanschauung*. Sebagai *weltanschauung*, Pancasila pun mengiluminasi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam proses lahirnya, Pancasila tidak lahir dari sebuah kebetulan melainkan lahir karena adanya ikhtiar menggagas nilai fundamental bagi bangsa Indonesia yang berasal juga dari bangsa Indonesia. Perjumpaan para Pendiri Bangsa dengan ideologi yang berkembang pada saat itu mengilhami dan terlihat ikhtiar mengkolaborasikan dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia. Inilah yang membuat Pancasila memiliki 'kharismanya' sendiri yang membedakan dirinya dari kedua ideologi besar yang dibahas sebelumnya. Secara final, Pancasila saat ini menggunakan yang ada pada rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pandangan Sukarno, Pancasila merangkul semua perbedaan dalam negara dan menjadi nilai rekonsiliatif baik dalam relasi antar warga negara maupun antar bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang digali dari akar kultur masyarakat Indonesia dan juga interaksi dengan ideologi dominan di dunia dapat menjadi dasar upaya menciptakan tatanan peradaban baru yang berdampak pada ketertiban dunia berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan dan persatuan, ketuhanan dan demokrasi. Pancasila memiliki daya rekonsiliatif atas pertentangan ideologis sebab Pancasila adalah sintesis dari ragam keyakinan, ragam perjuangan akan kemanusiaan dan harapan akan kebaikan semakin banyak orang. (Yudi Latif, 2018, pp, 67). Dalam perspektif itu tampak juga bahwa Pancasila memiliki daya alternatif dalam konflik ideologis.

Pancasila dan Tantangan Relativisme Postmodernisme

Pasca terbitnya karya Lyotard, *The Postmodernism Condition*, dunia seolah seketika itu juga masuk dalam era Postmodernisme. Walaupun Lyotard menggunakan term 'postmodernisme' namun sebenarnya term ini sudah muncul di literatur-literatur lain dalam filsafat barat (Stanford, 2022). Postmodernisme lahir dari kritik terhadap modernisme. Modernisme kental dengan makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Modernisme melahirkan utopia berupa situasi dimana seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Utopia ini diperparah dengan kemenangan Liberalisme yang akhirnya melahirkan petaka bagi manusia. Demi mencapai kemajuan, berbagai hal dikorbankan termasuk di dalamnya adalah manusia itu sendiri menjadi korban dari penindasan dan dominasi. Bagi Anthony Giddens, modernisme menimbulkan penindasan dalam penyelesaian masalah, penindasan 'si lemah', dan semakin melahirkan ketimpangan sosial (Johan Setiawan, 2018, pp. 28-29).

Melihat situasi yang lahir akibat modernisme adalah embrio yang melahirkan postmodernisme yang digarap oleh Lyotard dalam karyanya, *The Postmodernism Condition*. Dalam tulisannya, Lyotard menentang absolutisme terhadap sesuatu. Jika sebelumnya ilmu pengetahuan selalu identik dengan hal yang objektif maka bagi Lyotard, kajian pengetahuan juga selalu berada dalam ruang subjektifitas dan relatif. Relativisme kemudian pun menjadi salah satu ciri khas dari masa Postmodernisme.

Bagi Lyotard, pemikiran postmodernisme dalam realitas budaya, tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan disiplin ilmu Antropologi. Tidak ada budaya yang absolut kebenarannya karena kebudayaan satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan tidak selalu sebangun antara budaya satu dan lainnya (Johan Setiawan, 2018, pp. 33). Dari salah satu realitas itu didapatlah kejelasan, dalam postmodernisme, segala sesuatu itu relatif dan tidak mungkin absolut karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada (Johan Setiawan, 2018, pp. 34).

Paradigma postmodernisme memandang realitas tidak perlu didasari pada patokan atau kebenaran tunggal yang bersifat universal. Dalam hal ini realitas itu beragam dan plural, demikian juga kebenaran diterjemahkan dalam partikularitas bukan universalitas. Partikularitas dipandang sejajar dan tidak ada relasi superior serta tidak ada berperan dominan. Pandangan tentang realitas yang partikular dan mengakar pada lokalitas tidak tergantung pada metanarasi atau patokan dasar kebenaran (Willy Gaut, 2011, pp, 56). Perspektif ini bisa muncul pandangan kuat relativisme dalam menakar realitas. Dalam negara dengan ideologi Pancasila, relativisme dapat berkembang subur meski tentu bertentangan sebab Pancasila menawarkan nilai yang komprehensif bukan saja mencakup pandangan antroposentris realistik tetapi juga pandangan akan kehidupan manusia sebagai makhluk spiritual yang dapat menafsirkan hidup dalam relasi dengan Tuhan dan kehidupan yang akan datang setelah kematian, mau tidak mau Pancasila menawarkan nilai acuan sebagai dasar dan pegangan

4. DISKUSI

Pancasila, sebagaimana tercermin dalam namanya, terdiri dari lima prinsip dasar yang secara konseptual memiliki kedekatan dengan ideologi Liberalisme dan Sosialisme, namun tidak sepenuhnya identik dengan keduanya. Liberalisme yang menonjolkan nilai kebebasan dan demokrasi juga ditemukan dalam Pancasila, meskipun dalam konteks yang berbeda. Liberalisme cenderung memberikan ruang yang luas untuk definisi personal manusia tanpa keterikatan dengan

referensi teologis, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsinya. Sebaliknya, Pancasila secara eksplisit mendasarkan pandangan tentang manusia pada prinsip teologis yang bersumber dari agama, menjadikannya sebagai landasan dalam cara pandang dan cara berpikir. Selain itu, Pancasila juga menyerap inspirasi dari Sosialisme, terutama dalam komitmen terhadap penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sembari tetap memberikan ruang bagi kebebasan ekonomi dengan syarat bahwa kebebasan tersebut berorientasi pada pencapaian kebaikan bersama.

Kedua ciri khas itu dapat terlihat dalam beberapa sila. Dalam sila pertama, setiap orang diberi kebebasan dalam memiliki keyakinan yang membawanya menjadi manusia yang bertuhan dan berbudi mulia. Kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tidak terbatas karena ada batasan yaitu dari sila pertama ini tidak dimungkinkan seseorang untuk memilih menjadi tidak bertuhan atau anti-Tuhan seperti pada corak ideologi Komunisme – utopia dari Sosialisme. Kebebasan ini pula yang menjadi corak postmodernisme karena tidak mengandaikan bahwa ada satu keyakinan atau agama yang utama atau terbenar. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi mengandung makna imperatif bahwa setiap manusia yang hidup di Indonesia adalah manusia yang mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan mengekspresikannya dalam moral perilaku seraya menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia juga berasal dari campur tangan Tuhan sehingga lahir kesepakatan bahwa pengakuan akan eksistensi Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara (Pusat Studi Pancasila UNPAR, 2012, pp, 76). Akan tetapi juga perlu dikuti oleh kesadaran bahwa perbedaan tidak dapat menjadi alasan untuk mengancam kebebasan orang lain untuk mengekspresikan iman dan memeluk agama.

Sila kedua membahas tentang penghargaan Pancasila terhadap kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab cukup bercorak Liberalisme karena mengandaikan setiap orang memiliki hak yang sama dan kebebasannya dilindungi. Walaupun ada jaminan terhadap kebebasan yang dilindungi, pembeda sila ini dari Liberalisme berada di kata 'beradab'. Dari pembahasan sebelumnya, Liberalisme dapat 'mengabaikan' keberadaan demi mencapai tujuannya namun Pancasila tidak membuka peluang tersebut sebab Pancasila adalah ideologi terbuka yang memfasilitasi kebebasan sekaligus harus memberi perhatian besar pada kehidupan bersama.

Sila keempat dalam Pancasila membahas tentang sistem demokrasi. Seperti pada artinya, demokrasi mengandaikan rakyat memiliki peran dalam bernegara. Oleh sebab itu, sila ini dimulai dari kata 'kerakyatan' yang secara eksplisit menjelaskan bahwa Pancasila membahas tentang demokrasi. Walakin, sistem demokrasi dalam Pancasila tidaklah seperti dalam Liberalisme pada umumnya yang melulu ditentukan dengan suara terbanyak karena dalam Pancasila, demokrasi itu dijalankan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sila persatuan Indonesia juga mengindikasikan nilai yang berorientasi pada perhatian terhadap keberagaman sebagai keunikan Indonesia. Seperti Postmodernisme juga identik dengan keberagaman, akan tetapi belum tentu memiliki dasar seperti Pancasila yang mengafirmasi perbedaan akan cara berpikir dan cara pandang tentang apa itu kebenaran sekaligus menempatkan keberagaman tersebut dalam konteks kesatuan. Persatuan bukan sekadar menempelkan atau mencirikan subjek tertentu melainkan ada dalam pemahaman puncak tentang kebenaran sebagai sesuatu yang terus proses menjadi bukan hanya absolut dangkal dalam perspektif komunitas atau kelompok tertentu. Dari kelima sila itu, sila ketiga merupakan sila yang merupakan irisan Liberalisme dan Sosialisme. Persatuan Indonesia. Persatuan mengandaikan perbedaan diakui oleh Pancasila dan semua orang bebas dalam perbedaannya itu namun kebebasan itu diatur dalam suatu persatuan. Itulah Persatuan Indonesia. Setiap perbedaan itu disatukan yang akhirnya menjadikan Persatuan Indonesia.

Di sisi lain, Pancasila pun memiliki kedekatan dengan sosialisme. Ini terlihat secara eksplisit dalam sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Liberalisme tidak mengenal kebaikan untuk 'semua' melainkan sosialismelah yang memiliki ciri khas tentang kebaikan untuk semua (*bonum commune*). Akan tetapi karakter kebaikan bersama yang dimaksud bukan kesamaan dan kesejajaran semua dalam berbagai hal. Pancasila juga membuka ruang pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang terus berproses untuk bertumbuh secara bebas dengan mengekspresikan diri. Kebebasan mengembangkan dan mengekspresikan diri adalah nilai yang

ditawarkan dalam Pancasila sehingga keadilan sosial ciri khas Pancasila senantiasa memiliki nilai kebebasan dalam mengekspresikan diri sejauh kebebasan tersebut juga tidak mengancam kebebasan orang lain

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukanlah representasi dari Liberalisme maupun Sosialisme, meskipun setiap silanya memiliki elemen yang mendekati kedua ideologi tersebut. Ciri khas Pancasila terletak pada kemampuannya untuk merelatifkan kedua ideologi tersebut dan mengelaborasikannya dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hal ini terlihat, misalnya, pada sila pertama yang secara tegas mengakui keberadaan Tuhan, sebuah nilai yang tidak selalu ditemukan dalam Liberalisme.

Dalam konteks era postmodern yang ditandai dengan paradigma relativisme, Pancasila menawarkan solusi ideologis yang relevan. Relativisme postmodernisme menggugat absolutisme kebenaran yang kerap ditemukan dalam Liberalisme, sementara Pancasila menghadirkan harmoni antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Dengan keberagaman budaya, agama, ras, dan etnis di Indonesia, Pancasila muncul sebagai ideologi yang dapat mewakili komunitas internasional. Keberagaman tersebut, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, memberikan dasar bagi Pancasila untuk menjadi landasan kehidupan bernegara yang inklusif.

Sebagai ideologi, Pancasila mendukung pembentukan komunitas yang mengintegrasikan nilai individualisme dengan kerja sama sosial, yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai gotong royong. Nilai ini terbukti menjadi pilar keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan global, seperti pandemi. Oleh karena itu, Pancasila memiliki potensi sebagai alternatif solusi ideologi di era postmodern, mengintegrasikan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial dalam menciptakan tatanan dunia yang adil dan harmonis.

REFERENCES

- Adit, A., 2022. Siswa, Ini Daftar Suku di Indonesia. <https://edukasi.kompas.com/read/2022/01/24/100628571/siswa-ini-daftarsuku-di-indonesia?page=all> Diakses tanggal 24 Juli 2022.
- Borgias, Frans (Ed.), 2019. Kapitalisme, Sosialisme dan Keadilan: Kumpulan Artikel Agus Rachmat, OSC. Yogyakarta: Kanisius.
- Augustyn, A., 2021. Profit. <https://www.britannica.com/topic/profit> Diakses tanggal 28 Juni 2022.
- Editor, H., 2022. Cold War History. <https://www.history.com/topics/cold-war/cold-war-history> Diakses tanggal 28 Juni 2022.
- Gaut, Willy., 2011. Filsafat Postmodernisme Jean-Francois Lyotard. Maumere: Ledalero.
- Gratton, P., 2022. Jean François Lyotard. <https://plato.stanford.edu/entries/lyotard/> Diakses tanggal 20 Juni 2022.
- History.com, 2021. World War II History. <https://www.history.com/topics/world-war-ii/world-war-ii-history> Diakses tanggal 28 Juni 2022.
- Int, B. S. & Salugiasih, L. I., 2022. 1 Juni Hari Lahir Pancasila: Pengertian, Sejarah, dan Kronologi. https://www.idntimes.com/news/indonesia/seo-intern/1-juni-hari-lahir_pancasila-pengertian-sejarah-dan-kronologi
- Latif, Yudi., 2018. Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan. Jakarta: Mizan.
- Nugroho, H., 2000. Tinjauan Kritis Liberalisme dan Sosialisme. Jurnal Ilmiah Bestari, pp. 2-5. Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, 2012. Pancasila Kekuatan Pembebas. Yogyakarta: Kansius.
- Semarang, K., 2022. Talk Show Gema Kebangsaan: "IMPLEMENTASI KEMURNIAN PANCASILA".

https://kesbangpol.semarangkota.go.id/index.php/home_frontend/detail_berita/ 28 Diakses tanggal 7 Juli 2022.

Setiawan, J., 2018. Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Filsafat*, pp. 25-46.

Setiawan, J. & Sudrajat, A., 2018. Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Filsafat*, pp. 25-46.

Susanto, D., 2004. Konvergensi antara Liberalisme dan Kolektivisme sebagai Dasar Politik di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, pp. 262-283.

Umarhadi, Yosef. 2022. *Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonegoro dan Drijarkara*. Yogyakarta: Kanisius.